

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu muncul dalam proses pembangunan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu indikator ketertinggalan suatu daerah serta penghambat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2005). Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan nonmakanan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya (Badan Pusat Statistik, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran (BPS, 2019). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan konsumsi masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif serta pembangunan yang merata menjadi faktor penting dalam menurunkan

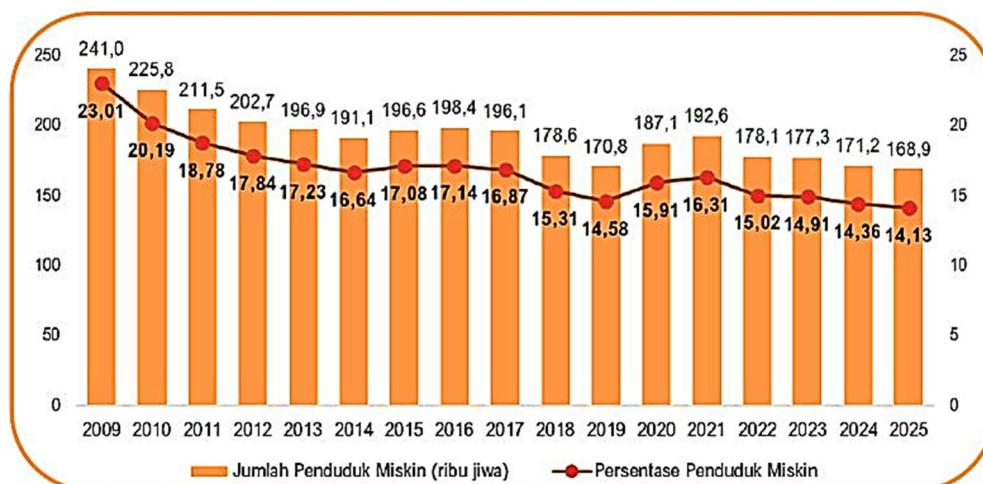
kemiskinan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah umumnya tercermin dari kemampuannya dalam menekan tingkat kemiskinan (Simatupang & Dermoredjo, 2003). Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama pembangunan global yang tertuang dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama SDGs (No Poverty) menegaskan pentingnya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya kesempatan kerja (Beik & Arsyianti, 2016). Kondisi ini dapat menimbulkan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), di mana rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan, investasi, dan produktivitas (Prawoto, 2009). Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran (Mishkin, 2012).

Kabupaten Tuban sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut belum sepenuhnya konsisten, karena jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Selain itu, garis kemiskinan pada Maret 2025 mencapai Rp. 504.823 per kapita per bulan, yang menunjukkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar dan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

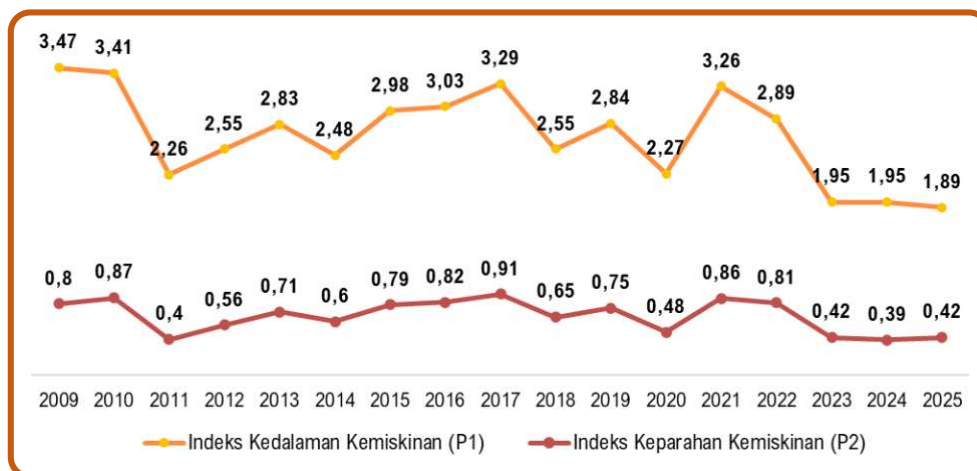
Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2009-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025 (Data diolah)

Selama periode 2008–2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang cenderung menurun. Nilai P1 turun dari 5,64 pada Maret 2008 menjadi 1,95 pada Maret 2023 dan kembali menurun menjadi 1,89 pada Maret 2025. Sementara itu, nilai P2 menurun dari 1,69 pada Maret 2008 menjadi 0,42 pada Maret 2023 dan berada pada angka 0,42 pada Maret 2025. Pada periode 2022–2023, P1 mengalami penurunan sebesar 0,94 poin dan P2 turun sebesar 0,39 poin. Adapun pada periode 2024–2025, P1 kembali menurun sebesar 0,06 poin, sedangkan P2 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,03 poin. Secara umum, perkembangan kedua indikator tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Tuban, meskipun masih terjadi fluktuasi pada beberapa periode tertentu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2025).

Gambar 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tuban, Tahun 2009-2025



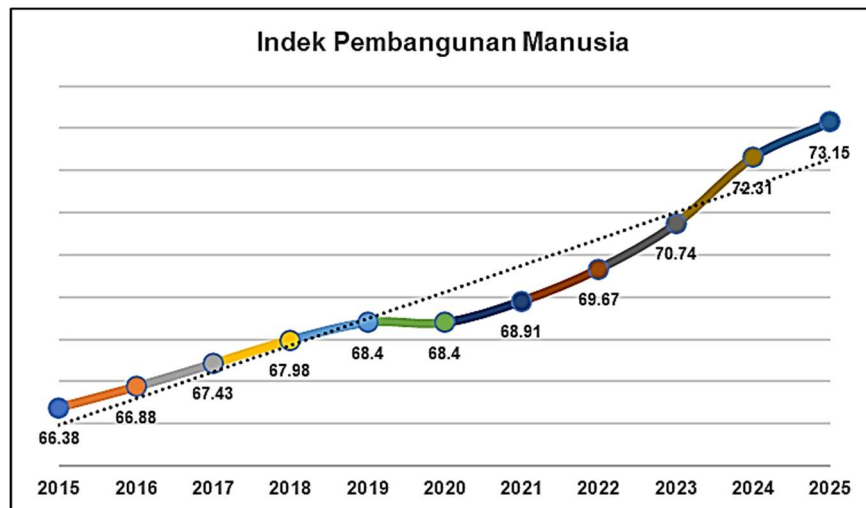
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2025 (Data diolah)

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan.

Untuk memahami kondisi tersebut lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Peningkatan kualitas pembangunan manusia diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan (United Nations Development Programme, 2020). Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Tuban tercatat sebesar 69,67 dan menunjukkan tren yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2015–2022, IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,593 poin per tahun. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, peningkatan IPM kembali berlanjut pada tahun 2021

seiring dengan pemulihan ekonomi yang berdampak positif terhadap konsumsi riil per kapita (Badan Pusat Statistik, 2023).

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2015-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025 (data diolah)

Di sisi lain, tingkat pengangguran di Kabupaten Tuban juga menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kemiskinan, karena mengurangi pendapatan masyarakat sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas. Selain itu, pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti menurunnya tingkat konsumsi, gangguan kesehatan, serta tekanan psikologis (Sukirno, 2011).

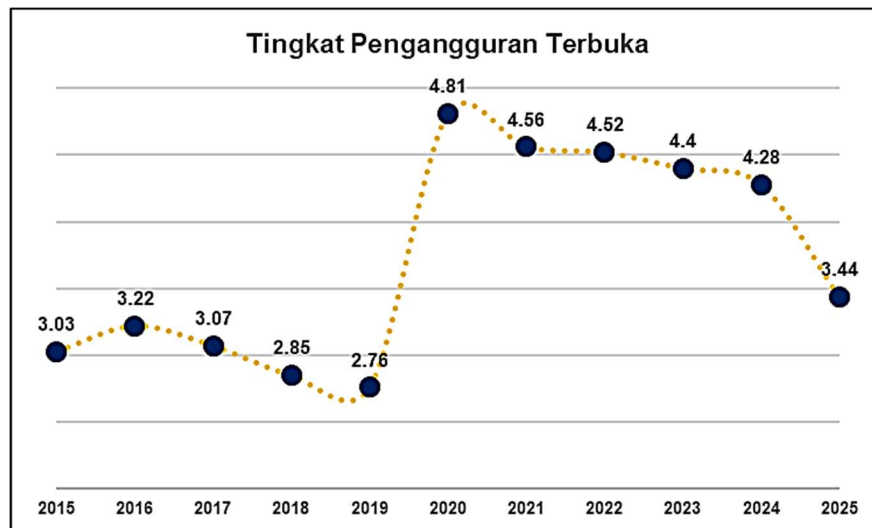
Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan daya beli masyarakat akibat hilangnya sumber pendapatan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta berpotensi meningkatkan tingkat

kemiskinan akibat terbatasnya kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan sumber pendapatan (Putra & Arka, 2016).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja. Sebagai ilustrasi, TPT sebesar 6% menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 6 orang yang menganggur. Di Kabupaten Tuban, TPT pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,28%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,40%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara lebih rinci, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban selama periode 2015–2025 menunjukkan pola fluktuatif. Pada periode 2015–2019, TPT cenderung mengalami penurunan dari 3,03% menjadi 2,76%, yang mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan menjadi 4,81% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Setelah itu, TPT kembali berfluktuasi pada periode 2021–2024, meskipun menunjukkan tren penurunan secara bertahap (Badan Pusat Statistik 2024).

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Kabupaten Tuban Tahun 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (data diolah)

Pada tahun 2025, TPT tercatat sebesar 3,44%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan periode puncak pandemi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran masih berada di atas kondisi sebelum pandemi, sehingga tetap menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan pengangguran belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Badan Pusat Statistik 2025).

Pembangunan suatu negara dapat dibilang berhasil dengan memperhatikan indikator penting yakni pertumbuhan ekonomi dan kemiskinannya. Agar tercapai pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang optimal, setiap negara akan berusaha keras, karena banyak negara di dunia menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai syarat terpenting dalam pengentasan kemiskinan. Akan tetapi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, terlihat diikuti oleh adanya tantangan meningkatnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Jonaidi et al., 2014).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada periode 2015–2025 diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, sehingga mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban (2016–2024), laju pertumbuhan ekonomi Tuban pada tahun 2015–2019 berada pada kisaran sekitar 5 persen, yaitu 5,02% (2015), 5,26% (2016), 5,13% (2017), 5,37% (2018), dan 5,32% (2019), yang menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil dan didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -5,85% akibat pandemi COVID-19 (BPS Kabupaten Tuban, 2021), kemudian mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,63% (BPS Kabupaten Tuban, 2022) dan meningkat tajam pada tahun 2022 sebesar 8,88% (BPS Kabupaten Tuban, 2023). Pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi kembali stabil masing-masing sebesar 4,36% dan 3,86% (BPS Kabupaten Tuban, 2024; BPS Provinsi Jawa Timur, 2024), sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban diproyeksikan tetap berada pada kisaran 4 persen sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Bappeda Kabupaten Tuban, 2025).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2015–2025 (PDRB ADHK)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	5.02
2016	5.26
2017	5.13
2018	5.37
2019	5.14
2020	-5.85

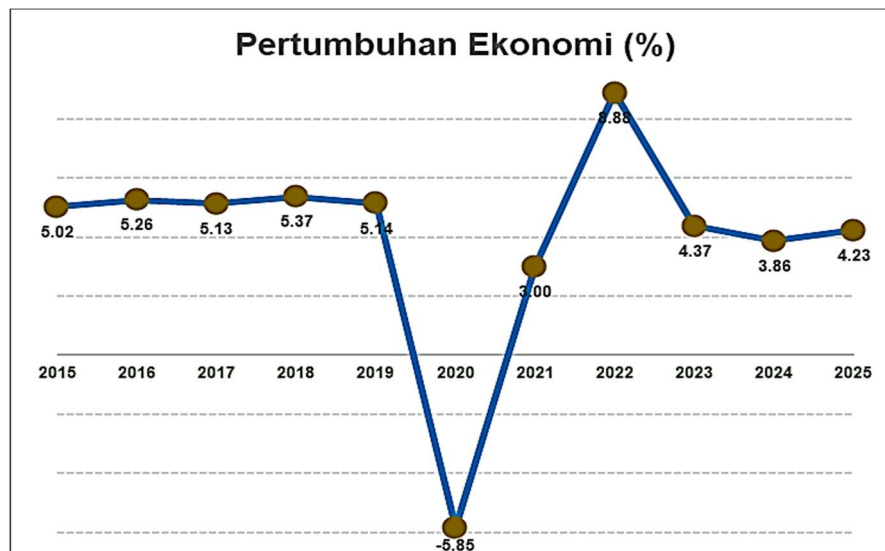
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2015–2025 (PDRB ADHK)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2021	3.00
2022	8.88
2023	4.37
2024	3.86
2025	4.23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami pola yang fluktuatif namun cenderung stabil dalam jangka panjang. Pada periode 2015–2019 pertumbuhan relatif konstan di sekitar 5 persen, kemudian terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021–2022 dan stabil pada tahun 2023–2025.

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2015–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5, terlihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban menunjukkan pola yang jelas, yaitu fase stabil pada 2015–2019, penurunan tajam pada 2020, kemudian pemulihan cepat pada 2021–2022, dan kembali stabil pada 2023–2025. Grafik ini memperkuat bahwa perekonomian Tuban bersifat resilien terhadap guncangan eksternal seperti pandemi, serta kembali menuju pola pertumbuhan jangka panjangnya.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa pandangan pakar ekonomi. Simon Kuznets (1966) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dalam kenaikan PDRB riil secara berkelanjutan. Robert Solow (1956) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sementara itu, John Maynard Keynes (1936) dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi terjadi akibat perubahan permintaan agregat, sedangkan pemulihan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks Kabupaten Tuban, pertumbuhan ekonomi periode 2015–2025 menunjukkan pemulihan pascapandemi COVID-19 yang cukup dinamis. Hal ini terlihat dari dominasi sektor industri pengolahan, khususnya semen dan petrokimia, sebagai penyumbang utama PDRB, yang sejalan dengan teori Solow dan Todaro & Smith (2015) mengenai peran modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan tingkat kemiskinan tidak berjalan secara seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif apabila tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang

memadai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian tradisional yang berproduktivitas rendah, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan keterampilan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan kondisi empiris mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, kondisi di Kabupaten Tuban memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan ketiga indikator tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan sehingga diperlukan analisis empiris yang lebih mendalam mengenai hubungan antarvariabel tersebut pada periode 2015–2025.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan apabila hasil pembangunan tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja, akan lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Sebaliknya, UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan memiliki pengaruh yang lebih stabil dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran secara umum berhubungan positif dengan peningkatan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban, serta mengkaji hubungan antarvariabel tersebut dalam periode 2015–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini mengidentifikasi masalah dengan cara berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat pengangguran secara Bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara spesifik ditujukan untuk :

1. Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis eksplorasi dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban.

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban.
4. Untuk menganalisis evaluasi secara keseluruhan pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan harapannya penelitian ini mampu berkontribusi berupa beberapa manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ekonomi pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan interaksi antara pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran, dan kemiskinan. Selain itu, riset ini juga bisa menjadi referensi atau materi kajian bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil studi diharapkan bisa menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif bagi Pemerintah guna mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi, sumber daya manusia, dan mengurangi pengangguran.

1.4.3 Manfaat Akademis

Hasil studi diharapkan bisa sebagai referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka diperlukan batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban. Data yang digunakan merupakan data sekunder berjenis *time series* tahun 2015 – 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban. Penelitian ini tidak membahas variabel lain di luar variabel yang telah ditentukan, seperti inflasi, investasi, maupun faktor sosial budaya lainnya. Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang lebih tajam dan mendalam mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.